

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: "pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang". Dalam cakupan yang amat luas itu, upaya pendidikan secara menyeluruh meliputi tiga wilayah kegiatan, yakni wilayah bimbingan, wilayah pengajaran dan wilayah latihan. Ketiga wilayah tersebut saling berkaitan, saling menunjang, dan bahkan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa: "Pendidikan Menengah Atas bertujuan menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi". Dalam rangka mewujudkan tujuan dan pengembangan pendidikan menengah umum tersebut, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu dilakukan antisipasi antara lain: (1) masalah perluasan dan pemerataan pendidikan menengah umum adalah rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) yang hanya mencapai kurang lebih 38 %. Hal ini antara lain disebabkan karena rendahnya kemampuan sebagian besar masyarakat, dan terbatasnya daya tampung Sekolah Menengah Atas, (2) masalah kualitas dan relevansi pendidikan menengah umum adalah rendahnya prosentasi lulusan Sekolah Menengah Atas yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi, (3) masalah manajemen pendidikan adalah kurang efektifnya manajemen pendidikan di sekolah karena pengaruh kebijakan sentralistik. (Kemendiknas, 2010: 177).

Melihat berbagai permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa mutu pendidikan khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah Umum masih rendah. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan telah lama dilakukan, namun berbagai indikator menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan kinerja sekolah belum meningkat secara signifikan. Untuk maksud tersebut diperlukan langkah-langkah mendasar, konsisten dan sistematis. Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Depdiknas, 2002 :3) telah merumuskan kebijakan pada masa depan yang lebih diarahkan pada tiga program yakni: (1) perluasan dan pemerataan pendidikan menengah umum, (2) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah umum, (3) peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Program perluasan dan pemerataan pendidikan menengah umum dilaksanakan antara lain melalui penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pengadaan unit gedung baru, penambahan ruang kelas belajar. Selain program-program yang bersifat fisik tersebut, upaya pemerataan kesempatan belajar dapat dilakukan melalui penyediaan/penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil, korban bencana alam, pengungsi, serta memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.

Program peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah umum diarahkan untuk meningkatkan mutu keluaran Sekolah Menengah Atas melalui berbagai upaya antara lain penyempurnaan kurikulum dan sistem pengajaran, peningkatan kualitas proses pembelajaran kelas, peningkatan kompetensi guru, pengembangan model-model penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas, pemberian bantuan dana operasional kepada sejumlah sekolah, peningkatan bakat dan prestasi siswa, dan program penanggulangan penyimpangan perilaku siswa (narkoba dan kenakalan remaja lainnya).

Program peningkatan efektivitas dan efisiensi diarahkan untuk memberdayakan Sekolah Menengah Atas melalui berbagai upaya antara lain peningkatan kinerja kepala sekolah, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pemberdayaan/revitalisasi berbagai organisasi yang ada seperti: MGMP, MKKS, Dewan Sekolah, pematapan penerapan School Based Management (SMB), pengembangan sistem akreditasi sekolah.

Kabupaten Buton Wilayah Buton Tengah sebagai salah satu Daerah Otonom Tingkat II Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam derap pembangunan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perhatian yang sangat istimewa dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat kita cermati dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Wilayah Buton Tengah yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan di daerah ini. Kemajuan pendidikan di Kabupaten Buton Wilayah Buton Tengah dalam tahun terakhir ini memang cukup menggembirakan. Dengan penempatan prioritas pembangunan pada bidang pendidikan ini, telah mendorong makin maraknya suasana belajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan dan mulai menjangkau ke pelosok daerah. Pada tahun 2009 APK yang dicapai untuk jenjang pendidikan menengah atas adalah 64,39 %, yang berarti jauh lebih tinggi dari angka pencapaian secara nasional. (Profil Pendidikan Kabupaten Buton Wilayah Buton Tengah, 2009: 75).

Sejalan dengan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dalam hal ini lebih dikhususkan pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, maka upaya pengelolaan sekolah memegang peranan yang sangat penting, karena sekolah merupakan tempat yang terlibat langsung dalam menangani dan melaksanakan proses belajar mengajar. Terlebih dengan diterapkannya Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

(MPMBS), maka sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru dijelaskan bahwa Kepala Sekolah merupakan jabatan kunci sebagai penentu, penggerak dan pendayagunaan semua sumber daya yang ada agar dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Adapun upaya peningkatan kualitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan leadership dan manajerial Kepala Sekolah dalam menjalankan fungsinya. Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pemimpin, sebagai administrator, dan sebagai supervisor di sekolahnya. (Kementerian Diknas, 2010: 176).

Selanjutnya guru merupakan salah satu komponen dalam pendidikan mempunyai peran yang dominan dalam peningkatan mutu pendidikan, karena guru adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran siswa di kelas. Agar proses pengajaran efektif, maka guru-gurunya juga harus berkualitas. Peningkatan kualitas guru dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain pelatihan-pelatihan, seminar, penelitian, melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-2). Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan kualitas guru yakni efektifitas supervisi atau pembinaan terhadap guru dalam melaksanakan fungsinya secara optimal.

Supervisi merupakan salah satu fungsi Kepala Sekolah yang sasarannya adalah meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan pengajaran. Melalui pelaksanaan supervisi yang efektif, Kepala Sekolah dapat mengontrol, membina, mendorong dan memotivasi guru-

guru untuk melaksanakan tugasnya yang lebih berkualitas. Namun berdasarkan kenyataan yang ada, kegiatan supervisi belum dilaksanakan secara efektif, baik dalam mekanisme pelaksanaan, implementasi dari hasil supervisi maupun dalam hal kemampuan atau profesionalisme dari pelaksana/petugas supervisi.

Peraturan pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 15 ayat 4 juga menyebutkan bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan professional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial (Suhardan, 2011)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Kemudian dalam pasal 5 disebutkan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengawas sekolah mempunyai wewenang untuk menetapkan tingkat kinerja guru, memilih dan menentukan metode kerja untuk

mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dan menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan, (Kemendiknas, 2010: 34).

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa peningkatan kinerja guru tidak terlepas dari pelaksanaan supervisi pendidikan. Sehubungan dengan pentingnya peningkatan kinerja guru ini, maka perlu diteliti seberapa jauh pengaruh pelaksanaan supervisi pendidikan terhadap peningkatan kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Buton Wilayah Buton Tengah.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh efektifitas supervisi terhadap kinerja guru ?
2. Bagaimana pengaruh bantuan supervisor terhadap kinerja guru ?
3. Bagaimana pengaruh kemampuan supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervisi terhadap terhadap kinerja guru ?
4. Bagaimana pengaruh pelaksanaan supervisi terhadap kinerja guru?

#### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

##### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh efektifitas supervisi terhadap kinerja guru
2. Mengetahui pengaruh bantuan supervisor terhadap kinerja guru

3. Mengetahui pengaruh kemampuan supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervisi terhadap kinerja guru

4. Mengetahui pengaruh pelaksanaan supervisi terhadap kinerja guru

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk

a. Melengkapi kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah.

b. Menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada :

a. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Wilayah Buton Tengah dan Pengawas

1) Sebagai umpan balik atas pembinaan yang telah dilakukan terhadap guru dalam meningkatkan kinerjanya.

2) Sebagai masukan untuk membuat suatu kebijakan dalam bidang supervisi pendidikan.

b. Kepala Sekolah

1) Sebagai evaluasi terhadap kegiatan supervisi yang telah dilakukan.

2) Sebagai masukan untuk dijadikan acuan agar tercapai supervisi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja guru.